

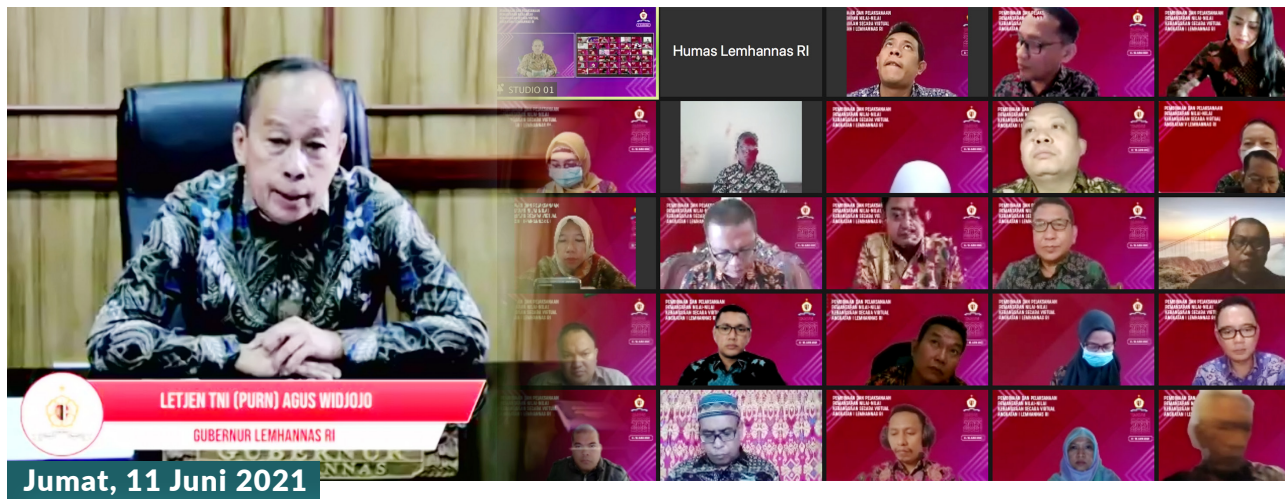
newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 144, Juli 2021



Pengantar Gubernur Kepada Peserta Taplai Virtual Angkatan I.....	2
Peluncuran Pelaksanaan Perpres No.7 Tahun 2021 Tentang RAN PE	3
Integrasi dan Uji Coba Pengukuran Ketahanan Nasional Basis Data Kabupaten/Kota.....	4
Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Lemhannas RI.....	5
Puslab Lemhannas RI Melakukan Workshop dengan Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian.....	6
Alumni ITB Memiliki Minat Cukup Tinggi Perdalam Wawasan Kebangsaan.....	7
Audiensi antara Lemhannas RI dengan Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia	7
Lemhannas RI Raih Opini WTP Untuk Ke-6 Kalinya.	8
Lemhannas RI Persiapkan Jakarta Geopolitical Forum Tahun 2021	9
Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber Training of Trainers Bela Negara UPN Veteran.....	10
Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	11

Lemhannas RI Raih Opini WTP Untuk Ke-6 Kalinya



Pengantar Gubernur kepada Peserta Taplai Virtual Angkatan I

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pengantar pimpinan kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai secara virtual Angkatan I Lemhannas RI, pada Jumat (11/6) secara daring.

Mengawali materinya, Agus mengatakan bahwa ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi bangsa agar mempunyai kekuatan karena daya tahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa dalam perjalanan menuju tujuan nasional, negara pasti harus menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Semua ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tersebut dapat diatasi jika negara memiliki kondisi ketahanan nasional yang baik.

Agus menegaskan bahwa ketahanan nasional bukan merupakan disiplin ilmu tunggal. Ketahanan nasional dibangun melalui pendekatan panca gatra, yakni gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kondisi tiap gatra akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional dan apabila ada salah satu gatra dalam kondisi kurang baik maka akan mempengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan. Untuk membangun tiap-tiap gatra dibutuhkan disiplin ilmu masing-masing gatra. Misalnya gatra ekonomi, membutuhkan disiplin ilmu ekonomi yang dipelajari di Fakultas Ekonomi.

Kemudian Agus juga menjelaskan bahwa kondisi ketahanan nasional juga dibangun melalui pendekatan spasial geografis, yakni kondisi ketahanan tiap-tiap provinsi. Kondisi ketahanan nasional dapat dikatakan baik jika keadaan kondisi seluruh provinsi dalam keadaan baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa saat membangun ketahanan provinsi dibutuhkan pendekatan gatra. Selain pendekatan panca gatra dan spasial geografis, dalam membangun ketahanan nasional, kondisi tri gatra yang terdiri dari geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam juga harus dijadikan dasar.

Dalam mencapai ketahanan nasional yang baik, dibutuhkan kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemimpin. Dalam hal tersebut, seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan dalam menyusun kebijakan serta kompetensi guna menyusun dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Kemudian Agus juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Oleh karena itu, memiliki perbedaan pandangan adalah sebuah hal yang diperbolehkan dan demokrasi juga menjamin adanya kebebasan berpendapat. Namun, segala pendapat dan gagasan harus bersumber dari Konsensus Dasar Bangsa dan bertujuan untuk memperkuat Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Agus, apabila kebebasan berpendapat disalahgunakan dengan menyusun sebuah gagasan yang berasal dari luar Konsensus Dasar Bangsa atau bertujuan diluar Konsensus Dasar Bangsa, maka hal tersebut patut dicurigai. "Perbedaan pendapat dan perbedaan gagasan harus berasal dari satu sumber yang sama dan bertujuan untuk satu tujuan yang sama, harus berasal dari Konsensus Dasar Bangsa dan bertujuan untuk memperkuat Konsensus Dasar Bangsa," ujar Agus.



Perbedaan pendapat dan perbedaan gagasan harus berasal dari satu sumber dan tujuan yang sama, berasal dari konsensus Dasar Bangsa dan bertujuan untuk memperkuat Konsensus Dasar Bangsa."

Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Peluncuran Pelaksanaan Perpres No. 7 Tahun 2021 Tentang RAN PE

Rabu, 16 Juni 2021

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan yang mewakili Gubernur Lemhannas RI, menghadiri kegiatan Peluncuran Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024, pada Rabu (16/6) secara daring.

Kegiatan tersebut dibuka dengan keynote speech dari Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin. "Saya harapkan peluncuran ini memperkuat komitmen semua pihak

yang terkait untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya," ucap Wapres.

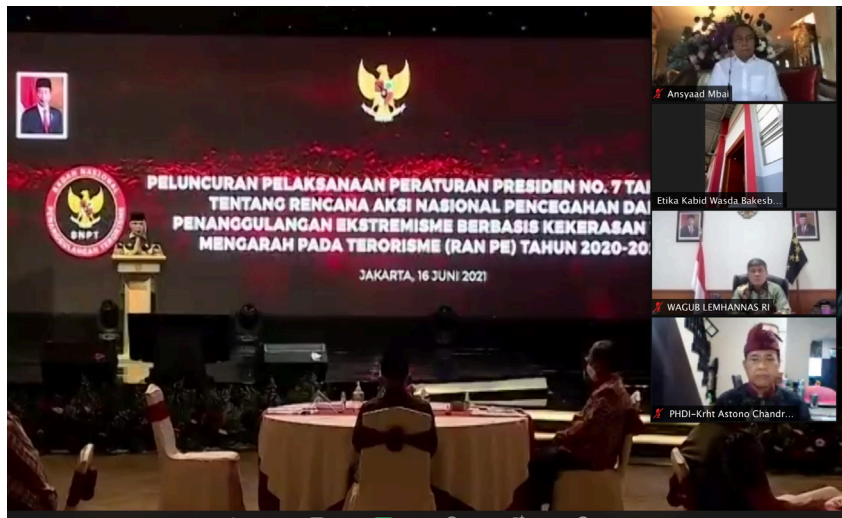
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang berakibat munculnya berbagai kejadian berbasis kekerasan. Hal tersebut secara nyata merupakan gangguan keamanan dalam kehidupan masyarakat, serta dapat mengancam ideologi, juga sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleran, radikalisme, dan ekstremisme," tegas Wapres.

Kemudian Wapres menyampaikan bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian tujuan RAN-PE tersebut adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Saya minta agar RAN-PE ini dilaksanakan dengan strategi yang komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, terukur, dan terpadu diperlukan kerja kolaborasi dan inklusif dari semua pihak," lanjut Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan pesan pada berbagai pihak. Kepada menteri dan pimpinan lembaga terkait agar bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui dukungan program kegiatan dan anggaran yang memadai. Kepada gubernur, bupati, dan walikota sebagai ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat agar bertanggung jawab serta memastikan RAN PE diimplementasikan di daerahnya masing-masing.

Khusus kepada BNPT sebagai leading sector dalam menjalankan RAN PE agar dapat mengkordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE dimaksud dengan baik. Kepada segenap tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu penentu keberhasilan dan implementasi RAN PE diharapkan selalu dapat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.



Rabu, 16 Juni 2021

Integrasi dan Uji Coba Pengukuran Ketahanan Nasional Basis Data Kabupaten/Kota

Kepala Pusat Laboratorium (Kapuslab) Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. bersama jajarannya melakukan Integrasi dan Uji Coba Pengukuran Ketahanan Nasional Basis Data Kabupaten/Kota pada Rabu (16/6) di Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Provinsi dengan Basis Kabupaten/Kota merupakan rangkaian kegiatan pengembangan sistem pengukuran ketahanan nasional yang telah dirancang sejak tahun 2015 terhadap seluruh Provinsi di Indonesia.

Pada Tahun Anggaran 2021, kegiatan pengembangan sistem pengukuran ketahanan nasional provinsi berbasis kabupaten/kota akan dilaksanakan pada tiga provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,

"Ketahanan nasional memiliki nilai yang sangat strategis bagi terjaminnya kelangsungan hidup kita bangsa Indonesia," kata Suroto. Lebih lanjut Suroto menyampaikan bahwa berbagai ancaman,

gangguan, hambatan, dan tantangan mulai dari persoalan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, separatisme, terorisme dan radikalisme, intoleransi, narkoba, bencana alam sampai dengan pandemi Covid-19 adalah tekanan-tekanan yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Suroto berpendapat bahwa dengan adanya berbagai tekanan yang begitu kompleks tersebut, apabila bangsa Indonesia tidak memiliki ketahanan yang sangat tangguh, maka tidak menutup kemungkinan akan berpotensi membahayakan negara yang bisa tergelincir menjadi negara gagal (failed state) atau bahkan menjadi negara hancur (collapse state).

Oleh karena itu, kondisi ketahanan nasional harus senantiasa dapat dipantau untuk mewaspadai dan menjaga agar kondisi ketahanan nasional senantiasa berada pada kondisi yang sangat aman. Dengan mengetahui kondisi ketahanan nasional, dapat diambil langkah atau upaya dalam antisipasi strategis dengan melakukan penguatan-penguatan pada aspek-aspek tertentu yang

dinilai masih lemah melalui program-program pembangunan nasional dan pembangunan nasional di daerah.

Kegiatan Integrasi dan Uji Coba Pengukuran Ketahanan Nasional Basis Data Kabupaten/Kota tersebut merupakan tahap lanjutan dari rangkaian kegiatan kerjasama pengukuran ketahanan nasional di Provinsi Kalimantan Utara dengan Pusat Laboratorium Lemhannas RI yang sudah diawali dengan kegiatan diseminasi sebelumnya pada tahun 2020 lalu.

Suroto menegaskan bahwa Kegiatan Integrasi dan Uji Coba Pengukuran Ketahanan Nasional Basis Data Kabupaten/Kota tersebut adalah dalam rangka merealisasikan pengembangan kemampuan aplikasi sistem pengukuran ketahanan nasional yang sudah dimiliki oleh Lemhannas RI dan sekaligus memperluas pemanfaatannya. "Tidak hanya bagi Lemhannas RI, tetapi juga dapat dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bahkan diharapkan sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara," tegas Suroto.





Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Lemhannas RI

Lemhannas RI menggelar sosialisasi terkait dengan tata naskah dinas dan kearsipan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 03 Tahun 2020 pada Kamis (17/6) secara daring.

Kegiatan diawali sambutan oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksmi TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP yang menyampaikan bahwa ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan di instansi pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah yang baik harus didukung oleh kemampuan tertib administrasi yang baik.

Menurutnya, salah satu komponen yang penting adalah administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga,

singkatan/akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran. Lemhannas RI telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Lemhannas RI No 3 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dengan ditertibkannya dasar hukum tersebut diharapkan pengaturan dan pengelolaan surat-surat dinas baik terhadap membuat surat, logo, ukuran/jenis kertas, penggunaan huruf, kewenangan tanda tangan maupun cap/stempel dinas dapat lebih teratur.

Sesuai dengan tema tersebut, turut mengundang sebagai narasumber Dra Dwi Mudalsih M.Hum arsiparis madya di lingkungan direktorat pusat dalam tugasnya melaksanakan pembinaan kearsipan di seluruh jajaran pemerintah di lingkungan kementerian, lingkungan lembaga baik lembaga negara

maupun lembaga non struktural.

Dwi membuka materinya dengan menyampaikan Dasar Hukum kearsipan yaitu Undang-Undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas saling terkait kepada implementasi Pergub Lemhannas RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.

Pergub tersebut mengacu pada peraturan Kepala Arsip Nasional RI no 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sehingga menjadi satu pedoman bagi seluruh lembaga negara baik pusat, maupun daerah, terkait dengan penyusunan penetapan tata naskah dinas di instansi masing-masing. Hal tersebut menjadi acuan secara nasional yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan penetapan tata naskah dinas di lingkungan masing-masing.

Ruang lingkup tata naskah dinas Lemhannas RI sesuai dengan Pergub No 3 Tahun 2020 sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas tersebut mencakup 5 kategori.

Jenis dan format naskah dinas hal ini penting karena tata naskah dinas ini menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik (SRIKANDI), Pembuatan Naskah Dinas meliputi huruf, template pembuatan surat, penggunaan logo, penggunaan tinta dan lain-lain. Kemudian, Penentuan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia(R), Tertata (T) dan Biasa (B) hal tersebut sebagai kode naskah arsip, penentuan hak akses masuk kedalam pengamanan naskah dinas, terkait dengan Penandatanganan Naskah Dinas dan Pengendalian Naskah Dinas". ujar Dwi



Selasa, 22 Juni 2021

Puslab Lemhannas RI Melakukan Workshop dengan Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian

Kepala Pusat Laboratorium (Kapuslab) Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. bersama jajarannya melakukan Workshop Pengukuran Kepemimpinan Nasional dengan Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian pada Selasa (22/6). Pada workshop tersebut, pihak Wikasatrian dipimpin langsung oleh Pamong Utama Wikasatrian Pusat Kepemimpinan WIKATony Warsono.

Workshop tersebut merupakan salah satu langkah dalam rangka mendukung tugas pokok Pusat Laboratorium Lemhannas RI, dimana Bidang Kepemimpinan Nasional (Bidpimnas) Puslab akan membangun sistem statik dan dinamik pengukuran kepemimpinan nasional.

Dalam perumusan pengukuran kepemimpinan tersebut diperlukan penetapan aspek-aspek, variabel, dan indikator yang akan digunakan untuk mengukurnya. Oleh karena itu, sebagai usaha memperkaya dan mempertajam konsep-konsep aspek, variabel, dan

indikator tersebut, maka dilaksanakan Workshop Pengukuran Kepemimpinan Nasional dengan Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian.

Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian dipilih karena salah satu tugasnya sebagai tempat pelatihan kepemimpinan yang menggunakan konsep kearifan lokal. "Kami ingin mendapatkan data dan masukan dari Wikasatrian tentang kepemimpinan nasional yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pembangunan nasional," kata Suroto.

Dalam paparannya, Suroto menyampaikan bahwa tujuan workshop ke Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian adalah guna mendukung pembangunan sistem statik dan dinamik pengukuran kepemimpinan nasional serta perumusan instrumen pengukuran kepemimpinan nasional seperti perumusan aspek, variabel, indikator, dan kuesioner.

Lebih lanjut Suroto menyampaikan beberapa manfaat pengukuran kepemimpinan nasional, yakni menghasilkan data penilaian pimpinan

nasional yang terukur secara objektif dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan, identifikasi dan *self control* kondisi pimpinan nasional, memetakan potret pimnas seperti wilayah mana yang sudah atau belum baik, mendiagnosa problematika pimpinan nasional, bahan koreksi, evaluasi dan edukasi pemimpin nasional, mendukung penelitian dan pengembangan pimpinan nasional, serta mewujudkan *good governance* dan *clean government* serta memperkuat ketahanan nasional.

Sementara, Tonny Warsono menyampaikan bahwa Wikasatrian adalah persembahan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk bangsa Indonesia melalui Pembelajaran Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal. Tujuan Program Kepemimpinan Wikasatrian dihadirkan untuk menjadi pusat pembelajaran kepemimpinan, baik intern maupun ekstern, untuk menjadikan pemimpin yang efektif, inspirator, dan panutan agar Indonesia lebih baik.

Kemudian Tony menyampaikan bahwa program kepemimpinan di Wikasatrian dilandasi oleh sudut pandang bahwa peserta pembelajaran adalah subjek yang memiliki nilai luhur dan kekuatan yang ditumbuh kembangkan atas pilhan sendiri. Pemimpin diharapkan efektif, berkontribusi, dan mewariskan karya terbaik dari diri dan organisasinya. Karena pemimpin sebagai pandu Indonesia dalam menggunakan keunggulan komparatif Indonesia menjadi keunggulan kompetitif.

Alumni ITB Memiliki Minat Cukup Tinggi Perdalam Wawasan Kebangsaan

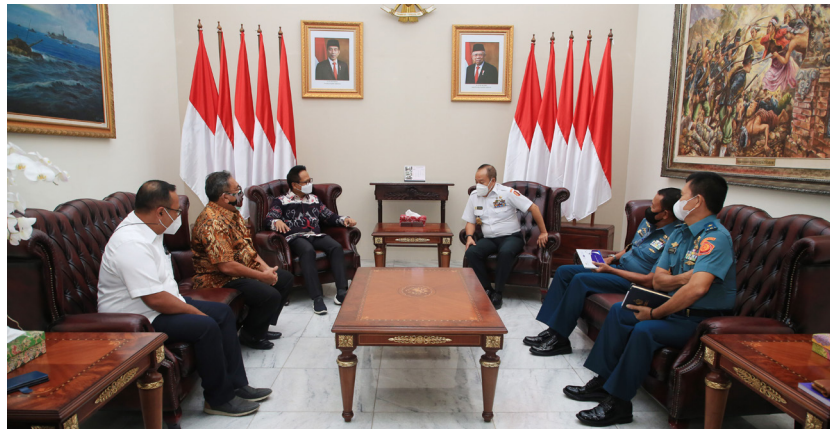
Rabu, 23 Juni 2021

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi dari Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum IA ITB Gembong Primadjaja pada Rabu (23/6) di ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gembong Primadjaja yang didampingi Ketua Alumni IA ITB Elfi Malano, Ketua Alumni IA ITB Lemhannas RI Angkatan I Agung, Ketua Staf Khusus IA ITB Adrian Tisna, dan Staf Khusus Bidang Antar Alumni IA ITB Gilang Hamzah, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai (Taplai) Virtual bagi IA ITB pada bulan Februari lalu.

Lebih lanjut Gembong menyampaikan bawah berharap pelaksanaan Taplai Virtual bagi IA ITB dapat berlanjut terus kedepannya. "Terus terang saja, Alumni ITB ini ternyata minatnya cukup tinggi untuk lebih memperdalam rasa wawasan kebangsaan mereka tentang berbagai macam hal," kata Agung.

Agung merasa bahwa program Taplai merupakan program yang menarik dan membanggakan. Sehingga pelaksanaan



di angkatan kedua direncanakan akan diikuti oleh peserta yang lebih banyak. "Kami ingin menyatukan semua Alumni ITB dan menyamakan persepsi tentang wawasan kebangsaan dan cinta kepada NKRI," ujar Agung. Lebih lanjut, Agung juga menyampaikan rencana pembuatan satu program atau webinar wawasan kebangsaan untuk mahasiswa baru ITB.

Agus Widjojo selaku Gubernur Lemhannas RI menyambut baik dan mendukung rencana-rencana yang

disampaikan. Agus berpendapat bahwa rencana tersebut adalah hal yang baik. Kemudian Agus menyampaikan bahwa rencana-rencana tersebut baiknya dikoordinasikan antara kedua instansi sehingga dapat diketahui harapan dari ITB dan kemampuan Lemhannas RI. "Dikoordinasikan saja dengan kalibrasi saja teknisnya dari ITB bagaimana keinginannya dan dari Lemhannas RI bagaimana kemampuannya," kata Agus.

Audiensi antara Lemhannas RI dengan Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia

Kamis, 1 Juli 2021



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi dari Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (PP Bakomubin) yang terdiri dari Ketua Umum Bakomubin Dr. H. Ali Mochtar Ngabalin, M.A. didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bakomubin Yayan Surahman, S.T, Ketua Bidang Hukum dan HAM Fajri Timur S.H., dan Koordinator Wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT Drs. H. M. Asraf Ali, pada Kamis (1/7), di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI.

Dalam audiensi yang menerapkan

protokol kesehatan secara ketat tersebut, Ketua Umum Bakomubin Dr. H. Ali Mochtar Ngabalin, M.A. menyampaikan bahwa Bakomubin baru saja melaksanakan Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) pada Mei lalu. Dalam Silatnas tersebut dibahas berbagai hal, diantaranya adalah moderasi beragama dan penguatan wawasan kebangsaan para mubaligh.

Oleh karena itu, menurut Ali, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari hal yang dibahas dalam Silatnas guna memberikan bekal wawasan nusantara kepada Mubaligh. "Dalam sejarah republik

baru ada Mubaligh di berikan Wawasan Kebangsaan di Lemhannas," kata Ali. Penguatan wawasan tersebut bertujuan agar mubaligh sudah memiliki wawasan yang mumpuni saat menyampaikan pesan.

Merespons hal tersebut, Agus selaku Gubernur Lemhannas RI menyambut baik niat tersebut dan hal tersebut belum terlambat untuk dilakukan. "Ini merupakan tantangan bagi kita semua karena kita tahu bahwa ditengah-tengah dengan penyebaran ajaran agama dengan kekentalan yang bersifat intoleran, kita harus berbuat, tidak bisa kita diam saja, tidak bisa kita hanya untuk mengkritik saja tetapi kita harus bisa berbuat," kata Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa masih menjadi tantangan dimana hasil pendidikan dan penguatan wawasan menjadi bentuk konkret dan tidak berhenti pada jargon saja. "Kami ini di Lemhannas harus konkret, kita tidak bisa lagi untuk bicara pada tantangan jargon idealisme dan normatif, itu harus dicari konkretnya. bagaimana yang dikehendaki mubaligh yang berwawasan kebangsaan, nah ini tantangan kita bersama," ujar Agus.

Lemhannas RI Raih Opini WTP Untuk ke-6 Kali

Selasa, 29 Juni 2021

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 pada Selasa (29/6) di Auditorium Badan BPK RI.

Pada kesempatan tersebut, Agus menerima langsung LHP atas LKKL Tahun 2020 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr.

Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA. Opini WTP tersebut merupakan capaian WTP Lemhannas RI yang ke-6 kali berturut-turut sejak tahun 2015.

Selain Lemhannas RI, ada 11 LKKL lainnya yang berada dibawah wewenang pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan (AKN) I yang meraih Opini WTP. Sebelas LKKL tersebut adalah LHP Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Wantannas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, BSSN, KPK, BNN, BMKG, Bawaslu, dan Basarnas.

Dalam memeriksa 12 LKKL Tahun 2020 tersebut, BPK menemukan permasalahan signifikan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI). Permasalahan tersebut diantaranya adalah belum memadainya penatausahaan dan pengamanan persediaan dan aset tak berwujud, belum memadainya penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan Barang Miliki Negara, penatausahaan dan pengamanan barang bukti dan barang rampasan tidak memadai,

serta SPI atas pengelolaan kas tidak memadai.

Selain itu ditemukan juga permasalahan signifikan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain adalah pengelolaan kas dibendahara pengeluaran tidak sepenuhnya sesuai ketentuan, terdapat realisasi pendapatan dan belanja di luar mekanisme APBN, serta realisasi belanja barang dan belanja modal tidak sesuai ketentuan. Namun, sebelum LHP diterbitkan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan.

"BPK mengapresiasi beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung," kata Hendra Susanto. BPK mengapresiasi tindak lanjut yang telah dilakukan dan berharap Kementerian/Lembaga dapat terus bekerja keras sehingga mempertahankan opini di tahun mendatang.





Lemhannas RI Persiapkan Jakarta Geopolitical Forum 2021

Lemhannas RI menggelar rapat koordinasi Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2021 secara virtual yang dipimpin Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan dihadiri Gita Wirjawan, MBA., MPA, Dr. Karlina Leksono Supelli, dan Tri Agung Kristianto, pada Senin (12/7) secara daring.

Pada kesempatan tersebut Gita Wirjawan, MBA., MPA menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan JGF 2021 membahas konteks peradaban dan perceraian hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks peradaban, peradaban Tiongkok adalah yang tertua dan untuk bisa menjembatani peradaban Tiongkok dan Amerika Serikat diperlukan usia peradaban yang sama dengan Tiongkok, misalnya Eropa dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Gita berpendapat bahwa diperlukan perwakilan kedua peradaban yang bisa memahami kepentingan Tiongkok dan menjadi jembatan ke Amerika Serikat.

Sependapat dengan Gita, Dr. Karlina Leksono Supelli menyampaikan bahwa penting untuk mengenali ancaman-ancaman yang akan muncul pada masa mendatang ditengah perceraian hubungan Amerika Serikat dengan

Tiongkok. Pada kesempatan tersebut, Karlina menyampaikan bahwa peradaban dibangun di atas human security, maka perlu difokuskan hal apa yang perlu diangkat. Menurut Karlina dapat dipertimbangkan kembali ke pembangunan manusia atau pemberdayaan dan dikemas dengan human security dan dignity. Karlina juga mengatakan bahwa struktur dunia saat ini ditandai dengan ketimpangan, kondisi tersebut tentu akan berpengaruh pada peradaban yang berpusat pada manusia.

Tri Agung Kristianto turut sejalan dengan Karlina, menurut Kristianto manusia adalah sentral. Kristianto juga berpendapat adanya pandemi menyadarkan bahwa budaya sudah semakin berkembang. Namun, setiap orang tetap membutuhkan orang lain misalnya sehebat apapun seorang ahli teknologi, akan tetap membutuhkan orang lain saat sakit. Hal tersebut menyadarkan betul bahwa kebudayaan yang dibangun di masa depan perlu menempatkan manusia sebagai sentral karena manusia tidak bisa hidup sendirian, tidak seperti mesin yang bisa di digitalisasi.

Sementara Agus sendiri mengharapakan bahwa harus jelas kemana arah JGF yang diinginkan, agar JGF tahun

ini lebih memiliki manfaat untuk kehidupan masa depan, bukan hanya sekedar berbagi pemikiran saja.



Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber **Training of Trainers Bela Negara UPN Veteran**

Senin, 12 Juli 2021



Gubernur Lemhannas RI menjadi salah satu narasumber pada Training of Trainers Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada Senin (12/7). Kegiatan tersebut diikuti oleh Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Mengawali materinya, Agus mengutip Presiden Joko Widodo yang pernah menyampaikan bahwa bela negara memiliki spektrum yang sangat luas. Bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi masing-masing.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa bela negara sangat luas

spektrumnya. Oleh karena itu, tidak hanya dilahirkan dari satu Kementerian/Lembaga karena lingkupnya nasional. Namun, Agus merasa bahwa dalam bela negara masih ada kerancuan-kerancuan yang terjadi karena adanya pemikiran bahwa bela negara adalah latihan baris berbaris dan angkat senjata.

Menurut Agus, fungsi penataan sistem bela negara belum memberikan makna yang dapat dilaksanakan secara konkret, komprehensif, dan final. "Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara," kata Agus.

Agus juga berpendapat bahwa seluruh warga negara harus dibentuk untuk cinta kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Kesadaran bela negara

hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. "Berbakti itu adalah memberikan kinerja terbaiknya dalam profesi masing-masing," ujar Agus.

Kemudian Agus menyampaikan elemen-elemen dasar dalam bela negara, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal untuk pertahanan (hal ini sebagai cikal bakal membentuk komponen cadangan). Diantara kelima elemen tersebut, empat elemen adalah softpower, sedangkan latihan kemiliteran hanya satu. "Jadi bisa kita katakan latihan kemiliteran hanya 20% tentang pembentukan kemampuan awal bela negara," kata Agus.

Lemhannas RI mengadakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, pada Kamis (15/07) secara daring. Sosialisasi tersebut mengangkat tema “Kebijakan Tata Kelola dan Kebijakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lemhannas RI” dan menghadirkan narasumber Direktur PT. Infinity Putera Omega Muhammad Rahmat Gunawan, S.T., M.T.

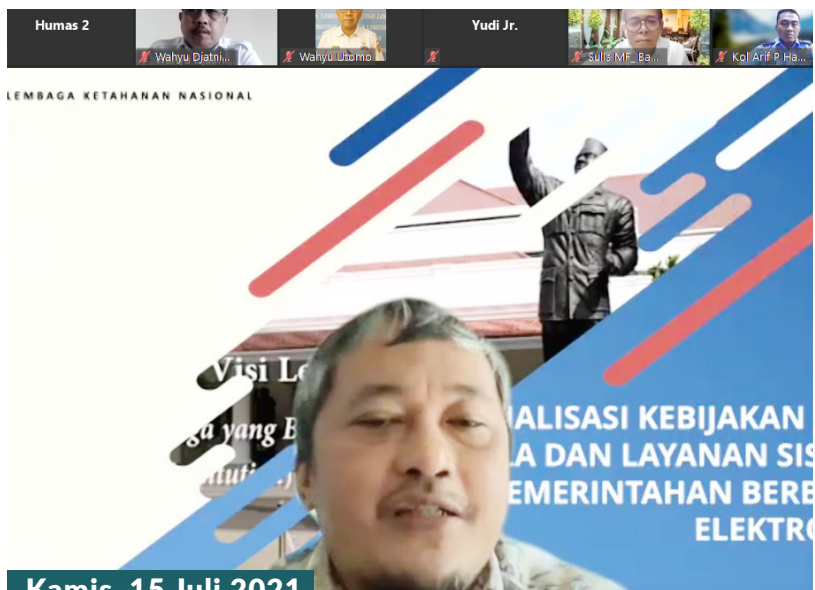
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pembukaan sosialisasi disambut oleh Kepala Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP membuka sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, Sri Widodo menjelaskan bahwa Pemerintah memerlukan persiapan yang matang untuk menciptakan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaya saing, dan sejajar dengan Negara maju di dunia. “Salah satu upaya untuk mendukung terciptanya Good Government adalah melalui penerapan E-Government,” kata Sri Widodo.

Lebih lanjut, Sri Widodo mengatakan Lemhannas RI telah mempunyai landasan hukum dalam mengimplementasikan SPBE, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 125 tahun 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kebijakan Layanan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Lemhannas RI.

Sri Widjojo mengatakan penerapan SPBE sudah dimulai sejak lahirnya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Menurutnya, saat ini Lemhannas RI telah membangun 30 sistem aplikasi. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dalam mendukung kebijakan SPBE Pemerintah.

Sementara Rahmat Gunawan selaku narasumber mengatakan hasil dari SPBE



Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

tersebut adalah meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintah Berbasis Elektronik serta meningkatkan utilisasi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. “Ada istilah aplikasi Bagi Pakai contohnya aplikasi JDIH, Jaringan Data Informasi dan Hukum, itukan yang membuat aplikasinya Kominfo kemudian dibagikan kepada seluruh Instansi,” kata Rahmat Gunawan.

Kemudian Rahmat mengatakan bahwa web atau aplikasi Pemerintah masih rentan dibajak, hal tersebut menjadikan web atau aplikasi Pemerintah menjadi sasaran pada Praktikum Keamanan Informasi dalam kuliah Keamanan Informasi karena sistem web dan aplikasi tersebut tidak dipelihara dengan baik. Lalu Rahmat Gunawan mencontoh kasus bocornya 279 Juta data peserta BPJS Kesehatan yang dijual pada situs Raid Forums.

Mantan Konsultan Kominfo tersebut berharap sistem informasi Pemerintah menjadi semakin aman. “Kriteria amannya

itu adalah CIA, Confidentiality terjamin, Integrity keutuhan data terjamin tidak dirubah, dan Accountability yaitu data yang digunakan jelas (penggunanya),” kata Rahmat Gunawan. SPBE bersifat Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik. Layanan Pemerintahan meliputi e-Office, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Money, sedangkan Layanan Publik meliputi e-Pengaduan, e-Kesehatan, dan e-Pendidikan.

”
Salah satu upaya untuk mendukung terciptanya Good Government adalah melalui penerapan E-Government.

Laksma TNI Sri Widodo, S.T. CHRMP
Kepala Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Agus Arif Fadila** Redaktur: **Alton Endarwanto Hadi Susanto**

Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**

Penerjemah: **Endah Heliana** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irmina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>